

**KONTRIBUSI PAJAK AIR PERMUKAAN TERHADAP PENDAPATAN  
ASLI DAERAH PADA UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN TEGAL**



TUGAS AKHIR

OLEH :

NURUL ISTIQOMAH

NIM 17031159

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI  
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

2020

## HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

KONTRIBUSI PAJAK AIR PERMUKAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH PADA UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TEGAL

Oleh mahasiswa :

Nama : Nurul Istiqomah

NIM : 17031159

Telah diperiksa dan di koreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing  
menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 14 Juli 2020

Pembimbing I,



Hetika, S.Pd, M.Si  
NIPY. 12.013.166

Pembimbing II,



Ghea Dwi Rahmadiane, SE, M.Si  
NIPY. 11.015.258

## LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

KONTRIBUSI PAJAK AIR PERMUKAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH PADA UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TEGAL

Oleh :

Nama : Nurul Istiqomah

NIM : 17031159


Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program  
Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal

Tegal, 14 Juli 2020

1. Hetika, S.Pd, M.Si  
Pembimbing I
2. Ghea Dwi Rahmadiane, SE, M.Si  
Pembimbing II
3. Andri Widiyanto, SE, M.Si  
Penguji I
4. Dewi Kartika, SE  
Penguji II



Mengetahui,

Ketua Program Studi



Yeni Pratiha Sari, SE, M.Si, Ak, CA  
NIPY. 009.011.062

### **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “KONTRIBUSI PAJAK AIR PERMUKAAN TERHADAP PEDAPATAN ASLI DAERAH PADA UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN KABUPATEN TEGAL” beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini atau adaya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 14 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Nurul Istiqomah

NIM : 17031159

### **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : NURUL ISTIQOMAH

NIM : 17031159

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.

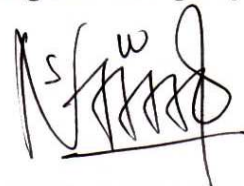
Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademi tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 14 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



NURUL ISTIQOMAH

NIM. 17031159

## **HALAMAN MOTTO**

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” (Ar-Rahman 13)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Al-Insyirah 5)

“Keputusan yang kau buat hari ini memengaruhi sisa hidupmu” (Reply 1994)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

Orang tua dan seluruh keluarga saya yang telah mendoakan, mendukung, dan banyak berkorban untuk saya.

Bu Hetika dan Bu Ghea yang sudah banyak membantu dan membimbing dengan amat sangat sabar.

Aeni, Tedi, Yafie, Yusup yang banyak menghibur dan mendukung saya dalam segala situasi.

Anisa Nur Hijati yang amat sangat banyak membantu saya dalam menyusun tugas akhir ini, selalu mendukung dan menghibur saya dalam segala kondisi.

Daynur, Leily, Sabil yang tidak henti saling mendukung satu sama lain, mengingatkan untuk terus berjuang dan tidak menyerah apapun keadaannya.

Neli Ayu Amalia yang selalu menyempatkan waktu untuk saling berbagi cerita.

Karyawan UPPD Kabupaten Tegal dan teman-teman PKL dari SMK Farmasi Muhammadiyah Lebaksiu yang banyak membantu dan banyak memberikan ilmu dalam proses berjalannya PKL.

Vidia, Umi, Bu Eli yang amat sangat baik, sangat membantu, dan memberikan banyak ilmu.

Teman-teman seperjuangan kelas 6K angkatan 2017 yang telah berjuang bersama melalui banyak rintangan selama 3 tahun terakhir.

Teman-teman grup Anak Twitter Tegal yang selalu memberikan semangat, saran serta selalu menghibur.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Pedapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal”.

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Mc. Chambali, B.Eng, EE, M.Kom, selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Ka.Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
3. Ibu Hetika, S.Pd, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Ghea Dwi Rahmadiane, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Toehoe Hardi, SH, selaku Ketua UPPD Kabupaten Tegal yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian pada kantor UPPD Kabupaten Tegal.
6. Seluruh karyawan dan karyawan Kantor UPPD Kabupaten Tegal yang telah memberikan bantuan selama melaksanakan penelitian.



7. Teman-teman baik di kampus maupun di kantor, yang telah memberikan dorongan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, turut membantu selesainya Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan disana-sini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada. Akhirnya, penulis sangat berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca serta pemerhati masalah akuntansi pada umumnya.

Tegal, 14 Juli 2020

NURUL ISTIQOMAH

NIM. 17031159

## ABSTRAK

Nurul Istiqomah. 2020. Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal. Program Studi D-III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Hetika. Pembimbing II: Ghea Dwi Rahmadiane.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam pemungutannya, Pajak Daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Salah satu yang termasuk dalam Pajak Provinsi adalah Pajak Air Permukaan, dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan mengalami beberapa hambatan seperti wajib pajak yang belum sadar bayar pajak dan wajib pajak yang belum mempunyai alat pengukur volume air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan Pajak Air Permukaan dan kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kantor UPPD Kabupaten Tegal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan responden, studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan data sekunder dari perusahaan, dan observasi dengan cara mengamati data. Metode analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, *editing*, *coding*, dan tabulasi. Hasil penelitian ini adalah penerimaan Pajak Air Permukaan selalu melampaui target yang ditetapkan dengan perolehan tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp. 284.367.627 dan dengan perolehan terendah pada tahun 2017 sebesar Rp. 164.272.055. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah masih tergolong sangat kurang dengan rata-rata 0,16%.

**Kata kunci** : Pajak Air Permukaan, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi

## **ABSTRACT**

Istiqomah, Nurul. 2020. *Contribution of Surface Water Tax to Local Revenue in the Tegal Regency Regional Revenue Management Unit*. Diploma III Accounting Study Program. Politeknik Harapan Bersama. First Advisor: Hetika. Secondary Advisor: Ghea Dwi Rahmadiane.

*Taxes are one of the largest sources of state revenue and are used to finance government expenditures. In its collection, the Regional Tax is divided into two, namely the Provincial Tax and Regency/City Tax. One of which is included in the Provincial Tax is a Surface Water Tax, in the implementation of Surface Water Tax collection there are several obstacles such as taxpayers who are not aware of paying taxes and taxpayers who do not yet have a water volume measurement device. The purpose of this research was to determine the calculation of Surface Water Tax and Surface Water Tax contribution toward local revenue in Tegal Regency Regional Revenue Management. The research method was descriptive quantitative. Data collection methods were interviews with respondents, documentation study was collecting data from Regency Regional Revenue management Tegal, and observation was observing data. Data analysis methods were data collection, editing, coding, and tabulation. Results of this study were that Surface Water Tax revenue exceeded the target with the highest acquisition in 2019 of Rp. 284,367,627 and the lowest acquisition in 2017 of Rp. 164,272,055. The results of this research showed that contribution of Surface Water Tax to Local Revenue classified as very less than average of 0.16%.*

**Keywords:** *Surface Water Tax, Local Revenue, Contribution*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TA.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Batasan Masalah.....	5
1.6 Kerangka Berpikir .....	5
1.7 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pengertian Pajak .....	10
2.2 Sistem Pemungutan Pajak .....	10
2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	13
2.4 Pengertian Pajak Air Permukaan.....	15
2.5 Perhitungan Pajak Air Permukaan .....	16
2.6 Kontribusi .....	17
2.7 Penelitian Terdahulu.....	17

BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Lokasi Penelitian .....	24
3.2 Waktu Penelitian .....	24
3.3 Jenis Data .....	24
3.4 Sumber Data .....	24
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	24
3.6 Metode Analisis Data .....	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	28
4.1 Analisis Data dan Pembahasan.....	28
4.2 Pembahasan .....	30
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	31
5.1 Kesimpulan.....	31
5.2 Saran .....	33
DAFTAR PUSTAKA .....	33
LAMPIRAN .....	35

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 4.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi PAP .....	28
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2017 Hingga Tahun 2019 .....	29
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 Hingga Tahun 2019 .....	29
Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017-2019 .....	30

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir .....	6
------------------------------------	---

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Data Rekapitulasi Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Tegal Tahun 2017.....	36
Lampiran 2 Data Rekapitulasi Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Tegal Tahun 2018.....	37
Lampiran 3 Data Rekapitulasi Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Tegal Tahun 2019.....	38
Lampiran 4 Laporan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.....	39
Lampiran 5 Laporan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.....	44
Lampiran 6 Laporan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.....	49
Lampiran 7 Pedoman Wawancara.....	54
Lampiran 8 Buku Bimbingan Tugas Akhir.....	56



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam mewujudkan pembangunan nasional di era globalisasi, pemerintah terus mengupayakan untuk melakukan pembangunan guna memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan yang lebih baik yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan nasional yang merata bukan merupakan suatu hal mudah. Pemerintah dengan kebijakannya memberikan wewenangnya kepada masing-masing daerah untuk bisa mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga tiap daerah bisa mandiri dalam mengelola dan menghidupi perekonomiannya agar tidak selalu bergantung pada pemerintahan pusat saja hal ini biasa dikenal dengan otonomi daerah (Martadani dan Hertati, 2019)<sup>[1]</sup>.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Hal ini sesuai dengan fungsi pajak yaitu *budgeter*. Pajak memiliki fungsi sebagai *budgeter* yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari hasil pengumpulan pajak. Dalam pemungutan pajak, pajak dipungut oleh pemerintahan pusat dan daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah

pusat hasilnya dipergunakan untuk membiayai rutin negara dan pembangunan (APBN). Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PPB perkebunan, perhutanan, pertambangan).

Sementara pajak yang dipungut oleh daerah digunakan untuk keperluan daerah dengan kontribusi wajib dari Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program kerjanya. Daerah diberi kewenangan untuk memungut 16 jenis pajak, yaitu 5 Pajak Provinsi dan 11 Pajak Kabupaten/Kota. Di antaranya pajak yang dipungut provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Di antara pajak daerah lainnya, Pajak Air Permukaan (PAP) merupakan potensi baru bagi penerimaan Pendapatan Daerah. Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah<sup>[2]</sup>, pengertian dari Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

Dalam membiayai suatu pembangunan, salah satu upaya pemerintah daerah adalah menyerap dana dari Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain dari Pendapatan Asli Daerah yang sah karena bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan pendapatan asli daerah dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi

daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal. (Rombang, 2013)<sup>[3]</sup>

Ditemukan bahwa selalu ada kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak air permukaan. Kendala yang dialami yaitu masih ada beberapa wajib pajak yang masih belum sadar bayar pajak sehingga dalam pelaksanaan penagihan harus datang ketempat wajib pajak secara langsung. Kemudian, belum semua tempat yang menjadi sasaran pajak air permukaan mempunyai alat pengukur volume pemakaian air sehingga wajib pajak setiap bulannya dikenai *flat* atau rata.

Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul “Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan pengenaan Pajak Air Permukaan?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan pengenaan Pajak Air Permukaan pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang kontribusi pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah pada unit pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Tegal dan sebagai bahan acuan di bidang penelitian sejenis.

2. Bagi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan saran bagi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal dalam kontribusi pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah pada unit pengelolaan pendapatan daerah yang diberikan kepada masyarakat luas (publik) sebagai penerima layanan.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

Diharapkan bagi pembaca ataupun adik kelas angkatan Politeknik Harapan Bersama Tegal bisa menjadi tambahan informasi, dan semoga dapat berguna juga sebagai literatur dan referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ini.

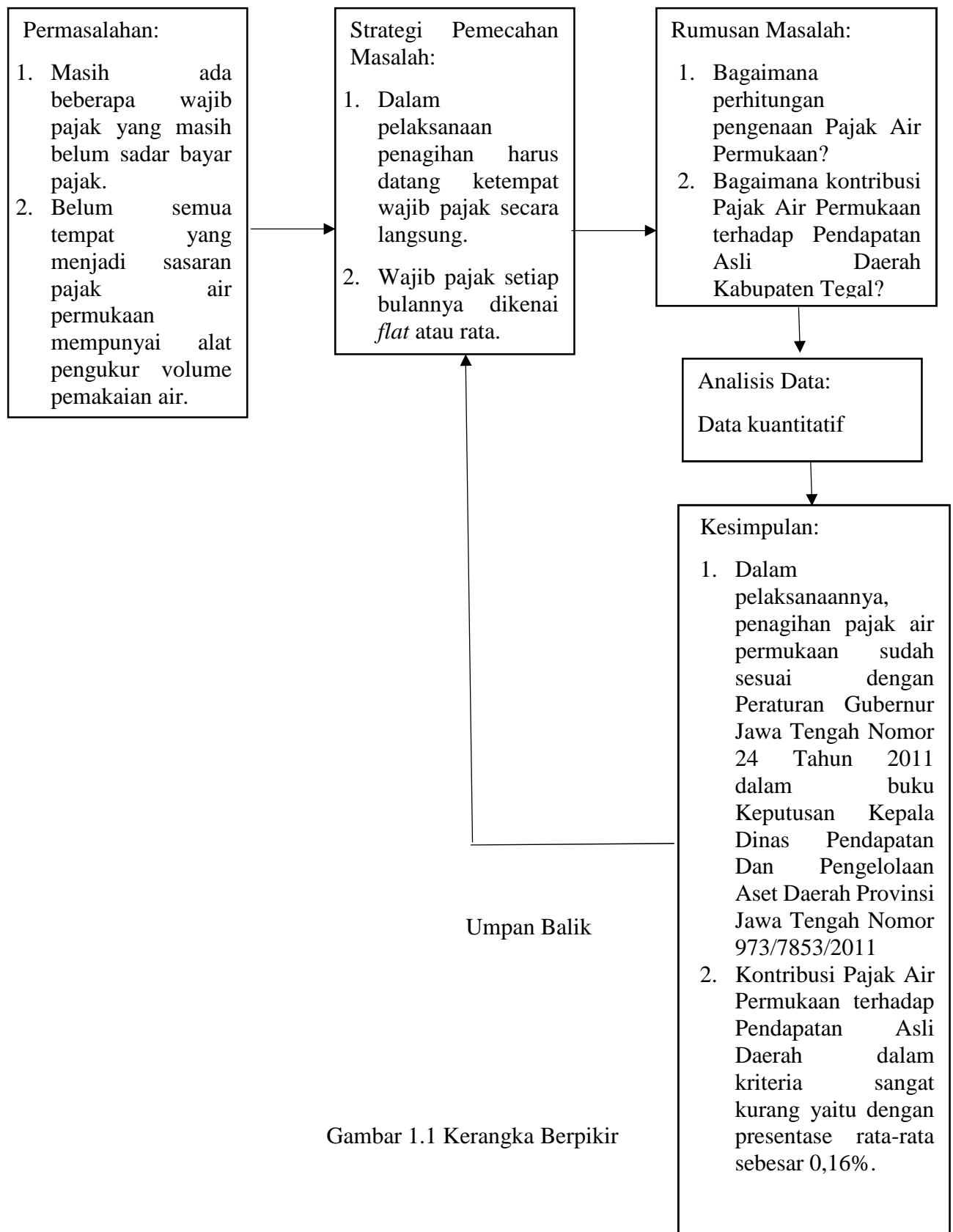
### **1.5 Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada kontribusi pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal. Pengambilan data dilakukan pada 3 Februari sampai 3 April 2020.

### **1.6 Kerangka Berpikir**

Pajak air permukaan merupakan potensi baru bagi penerimaan pendapatan daerah. Dalam menentukan seberapa besar pajak yang dikenakan, pajak air permukaan mempunyai perhitungan sendiri yang sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2011<sup>[4]</sup>. Dalam pemanfaatannya, pajak air permukaan bisa dikatakan berkontribusi secara maksimal jika realisasi pendapatan tiap tahunnya mencapai atau bahkan melampaui target. Semakin tinggi target serta realisasi tiap tahunnya, maka kontribusi pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah semakin maksimal.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir terdiri dari :

### a. Bagian Awal

Bagian awal memuat sampul depan dan halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tugas akhir (TA), halaman lembar pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar simbol, daftar lampiran

### b. Bagian Isi

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir, sistematika penulisan.

#### 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdapat telaah penelitian sebelumnya pada dasarnya dimaksudkan untuk menunjukkan pemahaman peneliti terhadap perkembangan penelitian sesuai dengan isu yang diteliti. Dalam bab ini juga dilampirkan tabel penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dan referensi penulis untuk menghindari duplikasi dan penelitian yang sama yang dibuat oleh peneliti sebelumnya.

### 3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi antara lain lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel (jika penelitian menggunakan metode sampel), sumber data, metode pengumpulan data, definisi konseptual, definisi operasional, metode analisis data, metodologi pengembangan sistem yang digunakan dan sebagainya.

### 4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum perusahaan yang berisi Sejarah Singkat Perusahaan, Struktur Organisasi Dan *Job Description* (Tugas dan Wewenang) dan Kondisi Perusahaan Saat Ini dijelaskan secara terperinci mengenai perusahaan tempat penelitian dilaksanakan dan memberikan gambaran dari analisa data penelitian yang ada pada perusahaan.

### 5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi garis besar kesimpulan yang diambil dari inti penelitian dan hasil penelitian berupa informasi kualitatif. Saran berisi garis besar saran-saran yang merupakan tindakan yang perlu diambil untuk ditindak lanjuti yang lebih baik dari hasil pemecahan masalah

### 6. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berupa suatu daftar dari semua pustaka yang hanya diacu secara langsung di dalam tubuh tulisan.



**c. Bagian Akhir**

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan<sup>[5]</sup>, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011:1)<sup>[3]</sup> pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib pada negara yang bersifat memaksa masyarakat berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran rutin negara dengan imbalan secara tidak langsung.

#### **2.2 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Rani M. (2018)<sup>[6]</sup> di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran

pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self assessment system* diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assessment*:

1. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
2. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
3. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

## 2. *Official Assessment System*

*Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.

Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Ciri-ciri sistem perpajakan *Official Assessment*:

1. Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
  2. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
  3. Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
  4. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.
3. *Withholding Assessment System*

Pada *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan *withholding system* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

## **2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah<sup>[7]</sup> adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan/atau yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah<sup>[11]</sup> Pasal 157 yaitu:

### **2.3.1 Hasil Pajak Daerah**

Sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah<sup>[2]</sup>, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.3.2 Hasil Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah<sup>[2]</sup>, yang dimaksud Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

### 2.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah<sup>[12]</sup> jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah;
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/badan usaha milik negara;
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

### 2.3.4 Lain-lain PAD yang sah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah<sup>[12]</sup> jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
2. Jasa giro;
3. Pendapatan bunga;
4. Jasa dana perguliran;

5. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
6. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah;
7. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
8. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
9. Pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan;
10. Pendapatan denda pajak;
11. Pendapatan denda retribusi;
12. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
13. Pendapatan dari pengembalian;
14. Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum;
15. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
16. Pendapatan dari BLUD;
17. Pendapatan dari sumbangan pihak ketiga;
18. Lain-lain penerimaan.

#### **2.4 Pengertian Pajak Air Permukaan**

Siahaan (2013:263)<sup>[3]</sup> menyatakan pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan (P3AP). Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang ada di laut maupun di darat. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah<sup>[2]</sup>, Pajak Air Permukaan adalah pajak atas

pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah<sup>[2]</sup> Pasal 23 Ayat (2), nilai perolehan air permukaan dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan pertimbangan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

1. jenis sumber air;
2. lokasi sumber air;
3. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. kualitas air;
6. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
7. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

## **2.5 Perhitungan Pajak Air Permukaan**

Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP). Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% dan besarnya Pajak Air Permukaan yang terutang adalah perkalian antara NPAP dan tarif. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2011 dalam buku Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 973/7853/2011<sup>[4]</sup> ditetapkan rumus sebagai berikut :



$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{NPAP}$$

## 2.6 Kontribusi

Dany H. (2006:264)<sup>[8]</sup> ”Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan.” Sementara menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yandianto (2000:282)<sup>[8]</sup> diartikan: ”Sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan.” Menurut Waani (2016) rumus untuk menghitung kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PAP} = \frac{\text{Realisasi Pajak Air Permukaan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1.	Waani (2016) “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara”	-Pajak Air Permukaan (X) -Pendapatan Asli Daerah (Y)	Deskriptif Kuantitatif	Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah sangat kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah dinilai telah kurang serius dalam

No.	Nama	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
				<p>memperhatikan, memanfaatkan, dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang tergolong dalam objek Pajak Air Permukaan serta faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi penerimaan Pajak Air Permukaan.</p>
2.	Pratiwi (2013) “Analisis Perhitungan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Pada Dispenda Provinsi Kepulauan Riau”	Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhitungan pajak air permukaan, harus dilihat tata cara yang diperlukan dalam perhitungan tersebut</li> <li>2. Keterlambatan pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pokok pajak yang harus dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan</li> </ol>

No.	Nama	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
				terhitung sejak saat terutangnya pajak.
3.	Hendri (2017) “Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Di Provinsi Riau”	Pajak Air Permukaan	Kuantitatif	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau kurang efektif dalam mengelola pajak air permukaan. Kontrol atau pun pengawasan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau terhadap pemungutan pajak air permukaan yang kurang baik menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya pemungutan pajak air permukaan tersebut, hal ini terjadi karena rata-rata perusahaan pengguna air permukaan yang menyebar dan jaraknya yang jauh di provinsi Riau.
4.	Wowor, dkk (2017) “Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak	-Akuntansi Pajak Air Permukaan (X)	Deskriptif	1. PDAM Kabupaten Minahasa Utara menggunakan dasar pengenaan pajak air permukaan tidak

No.	Nama	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
	Air Permukaan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Minahasa Utara”	-Perusahaan Daerah Air Minum (Y)		sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penentuan Nilai Perolehan Air Untuk Penetapan Pajak Air Permukaan, karena PDAM menggunakan angka volume air yang diproduksi, didistribusi, dan yang terjual melalui sumber air baku yang terdapat di beberapa tempat saja. 2. PDAM Kabupaten Minahasa Utara

No.	Nama	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
				membayar pajak air permukaan relatif kecil untuk tahun 2014, 2015 dan 2016, karena dasar perhitungan yang digunakan PDAM tidak memasukkan seluruh volume air yang diambil dan /atau dimanfaatkan sehingga hasil perhitungan untuk pembayaran pajak air permukaan menjadi sedikit.
5.	Rustam (2018) “Prosedur Pelaksanaan Perhitungan Dan Penagihan Pajak Air Permukaan Yang Terutang Oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”	Pajak Air Permukaan	Deskriptif Komparatif	1. Melihat gambaran dari penagihan pajak air permukaan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana sejauh ini Prosedur Penagihan Pajak Air Permukaan sudah diatur oleh SOP Penagihan Pajak Daerah mengacu pada Keputusan

No.	Nama	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
				<p>Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/I/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penagihan Pajak Daerah didalam SOP tersebut.</p> <p>2. Pelaksanaan penagihan pajak air permukaan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berjalan optimal dengan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang</p>

No.	Nama	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
				Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal di Jl. Cut Nyak Dhien Kalisapu, Slawi, Kabupaten Tegal.

#### **3.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan April 2020 sampai Juli 2020.

#### **3.3 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan (Sunandar, et al 2019:99)<sup>[9]</sup>.

#### **3.4 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya (Sarwono, 2007:123)<sup>[9]</sup>.

#### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit atau kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan



melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon (Sugiyono, 2017:137-138)<sup>[10]</sup>.

b. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2017:240)<sup>[10]</sup>.

c. Observasi

Sutrisno Hadi (1986)<sup>[10]</sup> mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

d. Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden dalam hal ini adalah karyawan perusahaan, kemudian mengumpulkan dan mengamati data sekunder lalu mengolahnya dalam bentuk tabel.

### 3.6 Metode Analisis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:8)<sup>[10]</sup> penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Adapun menurut Sugiyono (2017:147)<sup>[10]</sup> statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi menurut Waani (2016) adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PAP} = \frac{\text{Realisasi Pajak Air Permukaan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Penulis melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden dan mengumpulkan data sekunder dari perusahaan. Teknik pengolahan data yang digunakan penulis berupa:

a. *Collecting* atau Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:224)<sup>[10]</sup> teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

b. *Editing*

Sunandar, et al. (2019:105)<sup>[9]</sup> mengemukakan bahwa *editing* merupakan proses yang bertujuan meningkatkan ketepatan dari data yang diperoleh. Kegiatan ini meliputi usaha mengidentifikasi data yang tidak masuk akal, tidak lengkap, tidak konsisten dan jawaban yang membingungkan.

c. *Coding*

*Coding* adalah proses pemberian kode (pada umumnya angka) untuk setiap kemungkinan jawaban pada setiap daftar pemberian *coding* harus didesain sedemikian rupa sehingga akan mempermudah memasukkan data dan juga analisis data (Sunandar, et al. 2019:105-106)<sup>[9]</sup>.

d. Tabulasi

Tabulasi merupakan proses menyusun tabel yang membuat seluruh informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam penelitian. Tabulasi dapat dilakukan, baik secara manual maupun langsung dengan menggunakan *software* komputer seperti *Microsoft Excel* maupun SPSS (Sunandar, et al. 2019:106)<sup>[9]</sup>.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Analisis Data dan Pembahasan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, peneliti memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan dokumen-dokumen pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal serta melakukan wawancara dengan responden. Dokumen yang diperoleh berupa Rekapitulasi Pajak Air Permukaan tahun 2017-2019 dan Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2017-2019.

Menurut Hendri (2017) dalam artikel ilmiah Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Di Provinsi Riau<sup>[13]</sup> terdapat klasifikasi untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Air Permukaan di Kabupaten Tegal disusun ukuran sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Air Permukaan**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
>50	Sangat baik
40,10-50,00	Baik
30,10-40,00	Cukup baik
20,10-30,00	Sedang
10,10-20,00	Kurang baik
<10	Sangat kurang

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (Handoko:2013)

Berikut ini adalah data Target dan Realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan serta dari tahun 2017 hingga tahun 2019:

**Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan Tahun 2017 hingga Tahun 2019**

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
1	2017	148.106.000	164.272.055	111%
2	2018	128.000.000	239.128.695	186,82%
3	2019	240.000.000	284.367.627	118,49%

Sumber : Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal, 2020

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Air Permukaan mengalami peningkatan sebesar Rp. 74.856.640 pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan sebesar Rp. 45.238.932 pada tahun 2019. Penerimaan Pajak Air Permukaan selalu mengalami peningkatan dan mencapai target yang ditetapkan tiap tahunnya.

**Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 hingga Tahun 2019**

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
1	2017	187.278.667.000	196.214.502.080	104,77%
2	2018	193.040.086.200	210.850.374.795	109,23%
3	2019	214.293.548.000	219.047.457.677	102,22%

Sumber : Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 14.635.872.715 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 8.197.082.882. Pendapatan

Asli daerah pada tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dan mencapai target yang ditetapkan.

## 4.2 Pembahasan

**Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017-2019**

Tahun	Realisasi PAP (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Presentase	Kriteria
2017	164.272.055	196.214.502.080	0,08%	Sangat Kurang
2018	239.128.695	210.850.374.795	0,11%	Sangat Kurang
2019	284.367.627	219.047.457.677	0,13%	Sangat Kurang
Rata-rata			0,16%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa presentase kontribusi pajak air permukaan paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,13% dan memiliki rata-rata sebesar 0,16%, namun berdasarkan tabel kriteria kontribusi di atas masih tergolong sangat kurang. Tabel 4.4 juga menunjukkan presentase kontribusi mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 0,03% dan mengalami kenaikan sebesar 0,02% pada tahun 2019. Berdasarkan kriteria kontribusi maka masih tergolong sangat kurang. Ini menunjukkan bahwa pemerintah masih kurang dalam menggali, memanfaatkan, dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber yang tergolong dalam Pajak Air Permukaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Air Permukaan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP). Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% dan besarnya Pajak Air Permukaan yang terutang adalah perkalian antara NPAP dan tarif. Dalam pelaksanaannya, penagihan pajak air permukaan sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2011 dalam buku Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 973/7853/2011<sup>[4]</sup>.
2. Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam kriteria sangat kurang yaitu dengan presentase rata-rata sebesar 0,16%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal masih kurang dalam menggali, memanfaatkan, dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber yang tergolong dalam Pajak Air Permukaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Air Permukaan. Sumber- sumber yang tergolong dalam Pajak Air Permukaan jika dilihat dari jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang dilakukan, di antaranya:
  - a. Sosial
  - b. Perusahaan non-niaga.
  - c. Niaga atau perdagangan atau jasa.

- d. Industri atau penunjang produksi.
- e. Pertanian termasuk perkebunan, peternakan, dan perikanan.
- f. Tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air).
- g. Pertambangan.



## 5.2 Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk menghitung pajak terutang harus dihitung sesuai dengan rumus yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.
2. Pemerintah harus lebih dalam untuk menggali, memanfaatkan, dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber yang tergolong dalam Pajak Air Permukaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Air Permukaan. Serta mendatangi wajib pajak yang belum sadar bayar pajak untuk menagih pajak yang terutang dan memberikan penyuluhan agar terus sadar bayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Martadani, P. D. & Hertati, D (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang*, *Public Administration Journal*, 1(1), 34-48. (Tidak dipublikasikan).
- [2] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- [3] Waani, I.G.K. (2016). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Laporan Penelitian*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Bisnis, dan Akuntansi* Vol.4 (Tidak dipublikasikan).
- [4] Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 973/7853/2011 Tentang Petunjuk Teknik Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah [5] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- [6] Maulida, R. (2018). *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. (On-line) <https://www.online-pajak.com/sistem-pemungutan-pajak> diakses pada tanggal 22 April 2020
- [7] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
- [8] Ibrahim, A. *Konsep Dan Pengertian Kontribusi*. (On-line) <https://pengertiandefinisi.com/konsep-dan-pengertian-kontribusi/> diakses pada tanggal 3 Juni 2020
- [9] Sunandar, et al. (2019). *Metode Penelitian*. Tegal: Politeknik Harapan Bersama Tegal
- [10] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- [11] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- [12] Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- [13] Hendri, S. (2017). *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Di Provinsi Riau. Artikel Ilmiah*. Fakultas Ekonomi, Universitas Pengairan Rokan Hulu. (Tidak dipublikasikan).

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

## Data Rekapitulasi Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Tegal Tahun 2017

REKAPITULASI PAJAK AIR PERMUKAAN  
UPPD KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2017

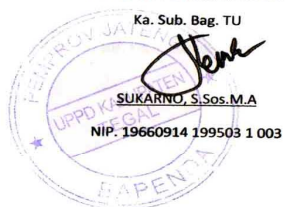
NO	OBJEK	PENERIMAAN												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PG PANGKAH			-					6.760.250	7.908.090	7.244.025			21.912.365
2	TIRTA SUKSES PERKASA		113.500	129.500	108.500	189.500	175.500	177.000	195.865	150.875	175.500	172.800	274.325	1.862.865
3	PDAM KAB TEGAL		1.226.000		3.609.500	1.672.500	1.715.000	1.949.000	1.650.000	1.611.000	1.690.275	1.476.500	3.872.400	20.472.175
4	PDAB TIRTA UTAMA JATENG										95.131.725	11.335.325	11.056.175	117.523.225
5	PLTMH TIMBANGREJA			-									989.050	989.050
6	PLTMH DANAWARIH			-									499.375	499.375
7	UD. TIRTA SARI				1.013.000									1.013.000
<b>J U M L A H</b>			<b>1.339.500</b>	<b>129.500</b>	<b>4.731.000</b>	<b>1.862.000</b>	<b>1.890.500</b>	<b>2.126.000</b>	<b>8.606.115</b>	<b>9.669.965</b>	<b>104.241.525</b>	<b>12.984.625</b>	<b>16.691.325</b>	<b>164.272.055</b>

111%

TARGET MURNI 2017 : Rp. 44.379.000,-  
 TARGET PERUBAHAN 2017 : Rp. 148.106.000,-

Mengetahui,  
 an. KEPALA UPPD KABUPATEN TEGAL

Ka. Sub. Bag. TU



KASI RPP

M. MASYHUDI  
 NIP. 19660623 198603 1 012

## Lampiran 2

## Data Rekapitulasi Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Tegal Tahun 2018

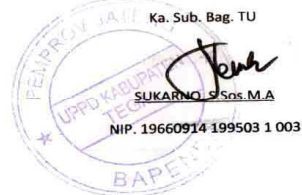
**REKAPITULASI PAJAK AIR PERMUKAAN  
UPPD KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2018**

NO	OBJEK	PENERIMAAN												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PG PANGKAH	-	-	-	-	-	-	-	7.273.980	6.767.760	-	-	-	14.041.740
2	TIRTA SUKSES PERKASA	-	155.325	116.300	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000	146.175	216.750	175.700	145.900	3.386.150
3	PDAM KAB TEGAL	-	2.176.950	2.386.950	2.108.075	2.260.350	2.207.775	2.531.025	2.200.625	2.009.125	2.495.100	2.407.125	2.863.560	25.646.660
4	PDAB TIRTA UTAMA JATENG	11.918.125	12.183.575	11.057.925	11.873.050	11.832.175	11.603.235	11.331.480	11.547.945	10.505.100	11.172.675	11.357.625	11.343.225	137.726.135
5	PLTMH TIMBANGREJA	981.600	946.200	-	1.820.900	-	1.067.050	1.955.820	526.500	-	279.250	94.800	-	7.672.120
6	PLTMH DANAWARIH	2.975	179.375	-	1.119.025	-	421.925	1.602.520	665.320	-	621.725	159.325	-	4.772.190
7	UD. TIRTA SARI	-	112.500	116.250	243.000	-	486.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	2.415.750
8	PDAM KOTA TEGAL	-	-	3.894.000	2.025.000	1.998.525	2.192.025	2.183.700	2.325.300	2.061.900	2.199.600	2.256.300	2.289.600	23.425.950
9	PUTRA JAYA	-	-	-	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	1.647.000
10	GUCIKU	-	-	-	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500	9.292.500
11	GUCIGUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	154.850	154.850	154.850	154.850	619.400
12	GRAHA TIRTA AYU (GTA)	-	-	-	-	-	-	-	-	510.300	510.300	510.300	510.300	2.041.200
13	HOTEL DUTA WISATA GUCI	-	-	-	-	-	-	-	-	318.675	318.675	318.675	318.675	1.274.700
14	PT. TUNAS JAYA SUKSES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.291.800	1.291.800	1.291.800	1.291.800	5.167.200
<b>J U M L A H</b>		<b>12.902.700</b>	<b>15.753.925</b>	<b>17.571.425</b>	<b>20.890.550</b>	<b>17.792.550</b>	<b>19.679.510</b>	<b>21.549.045</b>	<b>26.484.170</b>	<b>25.224.185</b>	<b>20.719.225</b>	<b>20.185.000</b>	<b>20.376.410</b>	<b>239.128.695</b>

186,82 %

TARGET MURNI 2018 : Rp. 128.000.000,-

Mengetahui,  
an. KEPALA UPPD KABUPATEN TEGAL  
Ka. Sub. Bag. TU



KASI RPP  
M. MASYHUDI  
NIP. 19660623 198603 1 012

## Lampiran 3

## Data Rekapitulasi Pajak Air Permukaan UPPD Kabupaten Tegal Tahun 2019

**REKAPITULASI PAJAK AIR PERMUKAAN  
UPPD KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2019**

NO	OBYEK	PENERIMAAN												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PG PANGKAH	-	-	-	-	-	-	1.303.350	5.138.550	4.759.350	-	-	-	11.201.250
2	TIRTA SUKSES PERKASA	-	166.500	120.525	139.025	127.425	144.450	97.100	139.550	92.825	79.025	59.450	88.175	1.254.050
3	PDAM KAB TEGAL	-	2.546.910	3.137.610	3.059.340	1.950.660	2.479.665	3.196.335	2.028.135	2.413.710	2.719.095	2.703.585	3.311.925	29.546.970
4	PDAB TIRTA UTAMA JATENG	11.379.345	11.399.460	10.693.800	11.800.860	11.842.740	12.266.220	12.611.445	12.286.215	11.889.855	11.599.875	12.599.505	11.791.845	142.161.165
5	PLTMH TIMBANGREJA	971.425	895.800	988.400	1.122.850	996.600	944.880	302.460	71.700	4.500	2.600	7.985	73.980	6.383.180
6	PLTMH DANAWARIH	1.198.575	706.375	533.575	655.650	148.350	416.200	435.560	175.950	24.800	15.600	41.650	176.450	4.528.735
7	UD. TIRTA SARI	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	2.916.000
8	PDAM KOTA TEGAL	2.208.900	2.318.100	2.084.400	2.314.500	2.380.800	2.045.100	2.070.900	2.187.300	2.022.750	2.043.750	2.068.350	1.935.150	25.680.000
9	PUTRA JAYA	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	2.196.000
10	GUCIKU	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500	1.032.500	12.390.000
11	GUCIGUNG	154.850	154.850	154.850	154.850	154.850	154.850	154.850	154.850	154.850	154.850	154.850	154.850	1.858.200
12	GRAHA TIRTA AYU (GTA)	510.300	510.300	510.300	510.300	510.300	510.300	510.300	510.300	510.300	510.300	510.300	510.300	6.123.600
13	HOTEL DUTA WISATA GUCI	318.675	318.675	318.675	318.675	318.675	318.675	318.675	318.675	318.675	318.675	318.675	318.675	3.824.100
14	PT. TIRTA JAYA SUKSES	1.291.800	1.291.800	1.291.800	1.291.800	1.291.800	1.291.800	1.291.800	1.291.800	1.291.800	1.291.800	1.291.800	1.291.800	15.501.600
15	HOTEL SANKITA	-	-	820.925	820.925	820.925	820.925	820.925	820.925	820.925	820.925	820.925	820.925	8.209.250
16	GRAND DIAN HOTEL	-	-	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	1.625.000
17	WANA WISATA GUCI	-	-	-	270.613	270.613	270.613	270.613	270.613	270.613	270.613	270.613	270.613	2.435.517
18	HOTEL GUCI INDAH	-	-	-	223.890	223.890	223.890	-	-	-	-	-	-	2.015.010
19	VILLA BUKIT MUTIARA GUCI	-	-	-	-	-	-	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	1.080.000
20	VILLA SAMPURNA GUCI	-	-	-	-	-	-	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	840.000
21	VILLA MAWAR INDAH GUCI	-	-	-	-	-	-	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000	1.218.000
22	VILLA PURI MUTIARA	-	-	-	-	-	-	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	285.000
23	HOTEL GRAND MEGA	-	-	-	-	-	-	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	780.000
24	VILLA MELATI 2	-	-	-	-	-	-	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	315.000
<b>J U M L A H</b>		<b>19.492.370</b>	<b>21.767.270</b>	<b>22.275.860</b>	<b>24.304.278</b>	<b>22.658.628</b>	<b>23.508.568</b>	<b>25.528.313</b>	<b>27.814.563</b>	<b>26.994.953</b>	<b>22.247.108</b>	<b>23.267.688</b>	<b>24.508.028</b>	<b>284.367.627</b>

118,49%

TARGET MURNI 2019 : Rp. 217.500.000,-  
TARGET PERUBAHAN : Rp. 240.000.000,-



KASI RPP

**M. MASYHUDI**  
NIP. 19600623 198603 1 012



## Lampiran 4

## Laporan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

::: PAD On-Line :::

<http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/print.php?aksi=print&modul=upad088&tabel=upad08...>

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BPPD  
UPPD Kabupaten Tegal

LAPORAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BAGIAN BULAN : Desember 2017

(Model : DPD-088)

TAHAPAN : 100.00%

KODE REKENING	JENIS PENDAPATAN	TARGET ( PERUBAHAN )	Setoran s.d BULAN LALU	Setoran BULAN INI	Setoran s.d BULAN INI	%	SELISIH LEBIH/KURANG	%
4.04.4.04.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	187.278.667.000	178.229.833.130	17.984.668.950	196.214.502.080	104.77 %	8.935.835.080	4.77 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1	PAJAK DAERAH	187.210.791.000	176.669.048.380	17.636.304.425	194.305.352.805	103.79 %	7.094.561.805	3.79 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01	Pajak Kendaraan Bermotor	79.524.900.000	75.409.781.300	8.620.875.600	84.030.656.900	105.67 %	4.505.756.900	5.67 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.01	A-1 Sedan,Jeep,Station Wagon(Pribadi)	22.848.000.000	21.250.249.750	2.916.535.650	24.166.785.400	105.77 %	1.318.785.400	5.77 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.02	A-2 Sedan,Jeep,Station Wagon(Umum)	125.200.000	141.191.775	40.369.200	181.560.975	145.02 %	56.360.975	45.02 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	98.300.000	111.506.600	8.198.500	119.705.100	121.78 %	21.405.100	21.78 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	100.100.000	103.053.675	14.817.200	117.870.875	117.75 %	17.770.875	17.75 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.05	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	8.208.000.000	7.453.867.450	887.597.850	8.341.465.300	101.63 %	133.465.300	1.63 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.06	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	4.335.300.000	4.544.887.050	461.666.525	5.006.553.575	115.48 %	671.253.575	15.48 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.07	D Kend. Khusus Alat-alat Berat (Pribadi)	9.200.000	5.764.000	0	5.764.000	62.65 %	-3.436.000	-37.35 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.09	E Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3	43.459.000.000	41.462.543.000	4.197.229.875	45.659.772.875	105.06 %	2.200.772.875	5.06 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.11	A-3 Sedan,Jeep,Station Wagon (Pemerintah)	162.700.000	167.285.175	57.871.125	225.156.300	138.39 %	62.456.300	38.39 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.12	B-3 Bus, Micro Bus (Pemerintah)	13.700.000	10.357.625	1.392.125	11.749.750	85.76 %	-1.950.250	-14.24 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.13	C-3 Truck, Pick Up (Pemerintah)	60.700.000	58.107.325	23.428.425	81.535.750	134.33 %	20.835.750	34.33 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.14	E-3 Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3 (Pemerintah)	71.900.000	82.893.875	11.769.125	94.663.000	131.66 %	22.763.000	31.66 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.15	D-3 Kend. Khusus Alat-alat berat dan Besar (Pemerintah)	32.800.000	18.074.000	0	18.074.000	55.10 %	-14.726.000	-44.90 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Pokok)	107.537.785.000	101.117.686.350	8.998.737.500	110.110.423.850	102.39 %	2.572.638.850	2.39 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.01	A-1 Sedan,Jeep,Station Wagon (Pribadi)	31.774.000.000	28.729.990.625	2.673.875.000	31.403.865.625	98.84 %	-370.134.375	-1.16 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.02	A-2 Sedan,Jeep,Station Wagon (Umum)	14.700.000	13.236.000	0	13.236.000	90.04 %	-1.464.000	-9.96 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	128.800.000	164.845.000	0	164.845.000	127.99 %	36.045.000	27.99 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	62.500.000	95.998.000	0	95.998.000	153.60 %	33.498.000	53.60 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.05	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	9.567.000.000	8.712.088.700	945.500.000	9.657.588.700	100.95 %	90.588.700	0.95 %

:: PAD On-Line ::

<http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/print.php?aksi=print&modul=upad08&tabel=upad08...>

KODE REKENING	JENIS PENDAPATAN	TARGET ( PERUBAHAN )	Setoran s.d BULAN LALU	Setoran BULAN INI	Setoran s.d BULAN INI	%	SELISIH LEBIH/KURANG	%
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.06	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	1.427.000.000	1.443.904.000	131.200.000	1.575.104.000	110.38 %	148.104.000	10.38 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.07	D Kend. Khusus Alat-alat berat dan Besar	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.09	E Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3	64.303.545.000	61.586.671.025	4.865.362.500	66.452.033.525	103.34 %	2.148.488.525	3.34 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pemerintah)	111.500.000	160.040.000	226.750.000	386.790.000	346.90 %	275.290.000	246.90 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.12	B-3 Bus, Micro Bus (Pemerintah)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.13	C-3 Truck, Pick Up (Pemerintah)	109.540.000	118.875.000	118.125.000	237.000.000	216.36 %	127.460.000	116.36 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.14	E-3 Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3 (Pemerintah)	39.200.000	86.038.000	37.925.000	123.963.000	316.23 %	84.763.000	216.23 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.15	D-3 Kend. Khusus Alat-alat berat dan Besar (Pemerintah)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.05	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.05.01	Premium	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.05.02	Pertamax	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.05.03	Pertamax Plus	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.05.04	Solar	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.05.05	Gas	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.05.06	Pertamina Dex	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.05.07	Pertalite	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.05.08	DEXLITE	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.06	Pajak Air Permukaan	148.106.000	147.580.730	16.691.325	164.272.055	110.92 %	16.166.055	10.92 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.06.01	Pajak Air Permukaan (AP) Indonesia Power	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.06.02	Pajak Air Permukaan (AP) Umum	148.106.000	147.580.730	16.691.325	164.272.055	110.92 %	16.166.055	10.92 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.07	Pajak Rokok	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.07.01	Pajak Rokok Provinsi	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.2	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>67.876.000</b>	<b>62.495.400</b>	<b>5.381.400</b>	<b>67.876.800</b>	<b>100.00 %</b>	<b>800</b>	<b>0.00 %</b>
4.04.4.04.01.00.00.4.1.2.02	<b>RETRIBUSI JASA USAHA</b>	<b>67.876.000</b>	<b>62.495.400</b>	<b>5.381.400</b>	<b>67.876.800</b>	<b>100.00 %</b>	<b>800</b>	<b>0.00 %</b>
4.04.4.04.01.00.00.4.1.2.02.31	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	67.876.000	62.495.400	5.381.400	67.876.800	100.00 %	800	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.2.02.31.01	Sewa Tanah dan Bangunan	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	100.00 %	0	0.00 %



:: PAD On-Line ::

<http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/print.php?aksi=print&modul=upad088&tabel=upad08...>

KODE REKENING	JENIS PENDAPATAN	TARGET ( PERUBAHAN )	Setoran s.d BULAN LALU	Setoran BULAN INI	Setoran s.d BULAN INI	%	SELISIH LEBIH/KURANG	%
4.04.4.04.01.00.00.4.1.2.02.31.02	Sewa Rumah Dinas	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.2.02.31.03	Sewa Gedung/Aula	3.660.000	3.355.000	305.000	3.660.000	100.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.2.02.31.05	Sewa Kantin/Foto Copy	10.080.000	9.240.000	840.000	10.080.000	100.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.2.02.31.06	Sewa Lahan Parkir	50.836.000	46.600.400	4.236.400	50.836.800	100.00 %	800	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.2.02.32	Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan (RTPHH)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
<b>4.04.4.04.01.00.00.4.1.4</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>	<b>1.498.289.350</b>	<b>342.983.125</b>	<b>1.841.272.475</b>	<b>0.00 %</b>	<b>1.841.272.475</b>	<b>0.00 %</b>
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Yang tidak Dapat Dipisahkan	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kntk Idk terpakai	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.01.02.a	Penjualan Peralatan kantor tdk terpakai	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.01.02.b	Penjualan Rumah Dinas Gol III	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.04	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.04.02	Kerugian Barang Daerah	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07	Pendapatan dari Sanksi / Denda Pajak Daerah	0	1.498.289.350	342.983.125	1.841.272.475	0.00 %	1.841.272.475	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13	Pendapatan Dari Sanksi / Denda Pajak Kendaraan Bermotor	0	1.458.514.925	340.007.125	1.798.522.050	0.00 %	1.798.522.050	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.01	A-1 Sedan,Jeep,Station Wagon(Pribadi)	0	255.334.325	81.195.100	336.529.425	0.00 %	336.529.425	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.02	A-2 Sedan,Jeep,Station Wagon(Umum)	0	2.968.175	599.725	3.567.900	0.00 %	3.567.900	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	0	610.100	44.850	654.950	0.00 %	654.950	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	0	1.934.275	281.350	2.215.625	0.00 %	2.215.625	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.05	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	0	134.760.675	31.772.275	166.532.950	0.00 %	166.532.950	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.06	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	0	115.359.525	36.023.700	151.383.225	0.00 %	151.383.225	0.00 %

::: PAD On-Line :::

<http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/print.php?aksi=print&modul=upad088&tabel=upad08...>

KODE REKENING	JENIS PENDAPATAN	TARGET ( PERUBAHAN )	Setoran s.d BULAN LALU	Setoran BULAN INI	Setoran s.d BULAN INI	%	SELISIH LEBIH/KURANG	%
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.07	D Kend. Khusus Alat-alat Berat (Pribadi)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.09	E Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3	0	939.568.100	188.133.925	1.127.702.025	0.00 %	1.127.702.025	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pemerintah)	0	3.508.575	1.105.825	4.614.400	0.00 %	4.614.400	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.12	B-3 Bus, Micro Bus (Pemerintah)	0	183.100	0	183.100	0.00 %	183.100	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.13	C-3 Truck, Pick Up (Pemerintah)	0	799.625	428.525	1.228.150	0.00 %	1.228.150	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.14	E-3 Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3 (Pemerintah)	0	3.488.450	421.850	3.910.300	0.00 %	3.910.300	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.15	D-3 Kend. Khusus Alat-alat berat dan Besar (Pemerintah)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14	Denda/Sanksi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0	39.774.425	2.976.000	42.750.425	0.00 %	42.750.425	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	0	17.351.375	1.845.000	19.196.375	0.00 %	19.196.375	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	0	233.450	0	233.450	0.00 %	233.450	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	0	28.800	0	28.800	0.00 %	28.800	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	0	59.325	0	59.325	0.00 %	59.325	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.05	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	0	4.069.100	645.000	4.714.100	0.00 %	4.714.100	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.06	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	0	6.905.875	0	6.905.875	0.00 %	6.905.875	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.07	D Kend. Khusus Alat-alat Berat (Pribadi)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.09	E Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3	0	11.119.700	486.000	11.605.700	0.00 %	11.605.700	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pemerintah)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.12	B-3 Bus, Micro Bus (Pemerintah)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.13	C-3 Truck, Pick Up (Pemerintah)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.14	E-3 Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3 (Pemerintah)	0	6.800	0	6.800	0.00 %	6.800	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.15	D-3 Kend. Khusus Alat-alat berat dan Besar (Pemerintah)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.17	DENDA AIR PERMUKAAN	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.17a	Denda PAP Indonesia Power	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.17b	Denda PAP Umum	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %

KODE REKENING	JENIS PENDAPATAN	TARGET ( PERUBAHAN )	Setoran s.d BULAN LALU	Setoran BULAN INI	Setoran s.d BULAN INI	%	SELISIH LEBIH/KURANG	%
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.19	Denda/Sanksi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.08	Pendapatan dari Sanksi / Denda Retribusi	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.08.01	Denda Retribusi Jasa Usaha	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.10.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji & Tunjangan	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.10.05	Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.10.06	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Tahun Lalu	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.18	Penerimaan Lain-Lain	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.18.02	Penerimaan Lainnya	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
	<b>Total ( Rekening )</b>	<b>187.278.667.000</b>	<b>178.229.833.130</b>	<b>17.984.668.950</b>	<b>196.214.502.080</b>	<b>104.77 %</b>	<b>8.935.835.080</b>	<b>4.77 %</b>

Mengetahui,  
Kepala UPPD KABUPATEN TEGAL  
Ka. Sub. Bag. TU



## Lampiran 5

## Laporan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

PAD On-Line

<http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/print.php?aksi=print&modul=upad08&tabel=upad08...>

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BPPD  
UPPD Kabupaten Tegal

LAPORAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BAGIAN BULAN : Desember 2018

(Model: DPD.088)

TAHAPAN 100.00%

KODE REKENING	JENIS PENDAPATAN	TARGET (PERUBAHAN)	Setoran s.d BULAN LALU	Setoran BULAN INI	Setoran s.d BULAN INI	%	SELISIH LEBIH/KURANG	%
4.04.4.04.01.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>193.040.086.200</b>	<b>190.344.111.710</b>	<b>20.506.263.085</b>	<b>210.850.374.795</b>	<b>109.23 %</b>	<b>17.810.268.595</b>	<b>9.23 %</b>
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>192.976.458.000</b>	<b>187.186.456.810</b>	<b>19.743.636.910</b>	<b>206.930.093.720</b>	<b>107.23 %</b>	<b>13.953.635.720</b>	<b>7.23 %</b>
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01	<i>Pajak Kendaraan Bermotor</i>	<b>89.766.458.000</b>	<b>83.438.314.525</b>	<b>11.120.880.200</b>	<b>94.559.194.725</b>	<b>105.34 %</b>	<b>4.792.736.725</b>	<b>5.34 %</b>
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.01	A-1 Sedan,Jeep,Station Wagon(Pribadi)	27.875.095.000	24.964.633.275	3.507.459.150	28.472.092.425	102.14 %	596.997.425	2.14 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.02	A-2 Sedan,Jeep,Station Wagon(Umum)	112.646.000	106.994.975	19.014.725	126.009.700	111.86 %	13.363.700	11.86 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	166.400.000	140.229.425	11.473.875	151.703.300	91.17 %	-14.696.700	8.83 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	93.016.000	86.193.700	6.841.300	93.035.000	100.02 %	19.000	0.02 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.05	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	8.715.000.000	8.317.968.900	1.133.615.900	9.451.584.800	108.45 %	736.584.800	8.45 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.06	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	4.169.648.000	4.059.922.450	298.025.925	4.357.948.375	104.52 %	188.300.375	4.52 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.07	D Kend. Khusus Alat-alat Berat (Pribadi)	8.743.000	8.360.000	360.000	8.740.000	99.97 %	-3.000	-0.03 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.08	D2 Kend. Khusus Alat-Alat Berat (Umum)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.09	E Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3	48.284.142.000	45.354.309.625	6.080.596.125	51.434.905.750	106.53 %	3.150.763.750	6.53 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pemerintah)	197.149.000	197.026.575	43.748.250	240.774.825	122.13 %	43.625.825	22.13 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.12	B-3 Bus, Micro Bus (Pemerintah)	10.939.000	10.319.400	0	10.319.400	94.34 %	-619.600	-5.66 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.13	C-3 Truck, Pick Up (Pemerintah)	46.564.000	87.705.325	9.777.200	97.482.525	209.35 %	50.918.525	109.35 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.14	E-3 Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3 (Pemerintah)	71.639.000	86.556.875	9.987.750	96.524.625	134.74 %	24.886.625	34.74 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.01.15	D-3 Kend. Khusus Alat-alat berat dan Besar (Pemerintah)	15.477.000	18.074.000	0	18.074.000	116.78 %	2.597.000	16.78 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03	<i>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Pokok)</i>	<b>102.994.000.000</b>	<b>103.529.390.000</b>	<b>8.599.535.500</b>	<b>112.128.925.500</b>	<b>108.87 %</b>	<b>9.134.925.500</b>	<b>8.87 %</b>
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	33.001.907.000	34.505.570.000	2.969.575.000	37.475.145.000	113.55 %	4.473.238.000	13.55 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	10.560.000	22.215.000	360.000	22.575.000	213.78 %	12.015.000	113.78 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	99.210.000	129.660.000	1.890.000	131.550.000	132.60 %	32.340.000	32.60 %

:: PAD On-Line ::

<http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/print.php?aksi=print&modul=upad088&tabel=upad08...>

KODE REKENING	JENIS PENDAPATAN	TARGET ( PERUBAHAN )	Setoran s.d BULAN LALU	Setoran BULAN INI	Setoran s.d BULAN INI	%	SELISIH LEBIH/KURANG	%
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	76.904.000	61.732.000	0	61.732.000	80.27 %	-15.172.000	-19.73 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.05	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	8.414.271.000	8.505.240.000	678.970.000	9.184.210.000	109.15 %	769.939.000	9.15 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.06	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	1.118.134.000	1.857.494.000	431.445.000	2.288.939.000	204.71 %	1.170.805.000	104.71 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.07	D Kend. Khusus Alat-alat berat dan Besar	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.09	E Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3	59.750.929.000	57.672.283.000	4.470.845.500	62.143.128.500	104.00 %	2.392.199.500	4.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pemerintah)	282.616.000	375.875.000	43.125.000	419.000.000	148.26 %	136.384.000	48.26 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.12	B-3 Bus, Micro Bus (Pemerintah)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.13	C-3 Truck, Pick Up (Pemerintah)	94.743.000	141.440.000	0	141.440.000	149.29 %	46.697.000	49.29 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.14	E-3 Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3 (Pemerintah)	144.726.000	257.881.000	3.325.000	261.206.000	180.48 %	116.480.000	80.48 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.03.15	D-3 Kend. Khusus Alat-alat berat dan Besar (Pemerintah)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.05	<i>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</i>	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.05.01	Premium	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.05.02	Pertamax	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.05.03	Pertamax Plus	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.05.04	Solar	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.05.05	Gas	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.05.06	Pertamina Dex	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.05.07	Pertalite	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.05.08	Dexlite	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.06	<i>Pajak Air Permukaan</i>	216.000.000	218.752.285	23.221.210	241.973.495	112.02 %	25.973.495	12.02 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.06.01	Pajak Air Permukaan (AP) Indonesia Power	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.06.02	Pajak Air Permukaan (AP) Umum	216.000.000	218.752.285	23.221.210	241.973.495	112.02 %	25.973.495	12.02 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.07	<i>Pajak Rokok</i>	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.1.07.01	Pajak Rokok Provinsi	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.2	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>63.628.200</b>	<b>62.795.400</b>	<b>5.381.400</b>	<b>68.176.800</b>	<b>107.15 %</b>	<b>4.548.600</b>	<b>7.15 %</b>
4.04.4.04.01.00.00.4.1.2.02	<i>RETRIBUSI JASA USAHA</i>	63.628.200	62.795.400	5.381.400	68.176.800	107.15 %	4.548.600	7.15 %



:: PAD On-Line ::

<http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/print.php?aksi=print&modul=upad088&tabel=upad08...>

KODE REKENING	JENIS PENDAPATAN	TARGET ( PERUBAHAN )	Setoran s.d BULAN LALU	Setoran BULAN INI	Setoran s.d BULAN INI	%	SELISIH LEBIH/KURANG	%
4.04.4.04.01.00.00.4.1.2.02.31	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	63.628.200	62.795.400	5.381.400	68.176.800	107.15 %	4.548.600	7.15 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.2.02.31.01	Sewa Tanah dan Bangunan	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	100.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.2.02.31.02	Sewa Gedung/Aula	3.660.000	3.355.000	305.000	3.660.000	100.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.2.02.31.03	Sewa Rumah Dinas	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.2.02.31.04	Sewa Kantin/Foto Copy	10.082.200	9.240.000	840.000	10.080.000	99.98 %	-2.200	-0.02 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.2.02.31.05	Sewa Lahan	46.286.000	46.600.400	4.236.400	50.836.800	109.83 %	4.550.800	9.83 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.2.02.32	Retribusi Tempat Pelelangan	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.2.02.3201	Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan (RTPH)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
<b>4.04.4.04.01.00.00.4.1.4</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>	<b>3.094.859.500</b>	<b>757.244.775</b>	<b>3.852.104.275</b>	<b>0.00 %</b>	<b>3.852.104.275</b>	<b>0.00 %</b>
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07	Pendapatan dari Sanksi / Denda Pajak Daerah	0	3.094.751.850	757.244.775	3.851.996.625	0.00 %	3.851.996.625	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13	Pendapatan Dari Sanksi / Denda Pajak Kendaraan Bermotor	0	3.011.767.425	718.158.475	3.729.925.900	0.00 %	3.729.925.900	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.01	A-1 Sedan,Jeep,Station Wagon(Pribadi)	0	550.365.350	133.724.850	684.090.200	0.00 %	684.090.200	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.02	A-2 Sedan,Jeep,Station Wagon(Umum)	0	4.792.100	197.900	4.990.000	0.00 %	4.990.000	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	0	2.456.525	52.100	2.508.625	0.00 %	2.508.625	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	0	4.579.100	62.925	4.642.025	0.00 %	4.642.025	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.05	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	0	286.641.275	79.655.525	366.296.800	0.00 %	366.296.800	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.06	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	0	216.979.800	10.232.425	227.212.225	0.00 %	227.212.225	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.07	D Kend. Khusus Alat-alat Berat (Pribadi)	0	12.650	0	12.650	0.00 %	12.650	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.09	E Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3	0	1.926.882.000	492.758.025	2.419.640.025	0.00 %	2.419.640.025	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.11	A-3 Sedan,Jeep,Station Wagon (Pemerintah)	0	6.795.100	491.100	7.286.200	0.00 %	7.286.200	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.12	B-3 Bus, Micro Bus (Pemerintah)	0	174.200	0	174.200	0.00 %	174.200	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.13	C-3 Truck, Pick Up (Pemerintah)	0	8.844.350	162.275	9.006.625	0.00 %	9.006.625	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.14	E-3 Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3 (Pemerintah)	0	3.244.975	821.350	4.066.325	0.00 %	4.066.325	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.13.15	D-3 Kend. Khusus Alat-alat berat dan Besar (Pemerintah)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %

:: PAD On-Line ::

<http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/print.php?aksi=print&modul=upad088&tabel=upad08...>

KODE REKENING	JENIS PENDAPATAN	TARGET ( PERUBAHAN )	Setoran s.d BULAN LALU	Setoran BULAN INI	Setoran s.d BULAN INI	%	SELISIH LEBIH/KURANG	%
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14	Denda/Sanksi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0	82.979.550	39.086.300	122.065.850	0.00 %	122.065.850	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.01	A-1 Sedan,Jeep,Station Wagon(Pribadi)	0	31.109.000	6.472.800	37.581.800	0.00 %	37.581.800	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.02	A-2 Sedan,Jeep,Station Wagon(Umum)	0	102.700	0	102.700	0.00 %	102.700	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	0	180.400	0	180.400	0.00 %	180.400	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	0	199.875	0	199.875	0.00 %	199.875	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.05	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	0	7.585.200	1.608.900	9.194.100	0.00 %	9.194.100	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.06	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	0	16.077.000	29.486.700	45.563.700	0.00 %	45.563.700	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.07	D Kend. Khusus Alat-alat Berat (Pribadi)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.09	E Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3	0	27.638.975	1.517.900	29.156.875	0.00 %	29.156.875	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pemerintah)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.12	B-3 Bus, Micro Bus (Pemerintah)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.13	C-3 Truck, Pick Up (Pemerintah)	0	86.400	0	86.400	0.00 %	86.400	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.14	E-3 Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3 (Pemerintah)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.14.15	D-3 Kend. Khusus Alat-alat berat dan Besar (Pemerintah)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.17	DENDA PAJAK AIR PERMUKAAN	0	4.875	0	4.875	0.00 %	4.875	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.17a	Denda PAP Indonesia Power	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.17b	Denda PAP Umum	0	4.875	0	4.875	0.00 %	4.875	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.07.19	Denda/Sanksi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.08	Pendapatan dari Sanksi / Denda Retribusi	0	107.650	0	107.650	0.00 %	107.650	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.08.01	Denda Retribusi Jasa Usaha	0	107.650	0	107.650	0.00 %	107.650	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.18	Penerimaan Lain-Lain	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.04.4.04.01.00.00.4.1.4.18.02	Penerimaan Lainnya	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
<b>Total ( Rekening )</b>		<b>193.040.086.200</b>	<b>190.344.111.710</b>	<b>20.506.263.085</b>	<b>210.850.374.795</b>	<b>109.23 %</b>	<b>17.810.288.595</b>	<b>9.23 %</b>

Slawi, 12 Maret 2020  
KEPALA UPPD Kabupaten Tegal

<http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/print.php?aksi=print&modul=upad088&tabel=upad08...>

Mengetahui,

an. KEPALA UPPD KABUPATEN TEGAL

Ka. Sub. Bag. TU



SUKARNINGRATOS, M.A

NIP. 19660914 199503 1 003



## Lampiran 6

## Laporan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

::: PAD On-Line :::

<http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/print.php?aksi=print&modul=upad088&tabel=upad08...>

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BPPD  
UPPD Kabupaten Tegal

LAPORAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BAGIAN BULAN : Desember 2019

(Model : DPD-088)

TAHAPAN : 100.00%

KODE REKENING	JENIS PENDAPATAN	TARGET ( PERUBAHAN )	Setoran s.d BULAN LALU	Setoran BULAN INI	Setoran s.d BULAN INI	%	SELISIH LEBIH/KURANG	%
4.02.4.02.01.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>214.293.548.000</b>	<b>201.985.194.734</b>	<b>17.062.262.943</b>	<b>219.047.457.677</b>	<b>102.22 %</b>	<b>4.753.909.677</b>	<b>2.22 %</b>
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>214.221.908.000</b>	<b>198.203.965.559</b>	<b>16.755.392.718</b>	<b>214.959.358.277</b>	<b>100.34 %</b>	<b>737.450.277</b>	<b>0.34 %</b>
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.01	<i>Pajak Kendaraan Bermotor</i>	<i>100.491.000.000</i>	<i>95.168.884.850</i>	<i>7.899.628.300</i>	<i>103.068.513.150</i>	<i>102.56 %</i>	<i>2.577.513.150</i>	<i>2.56 %</i>
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.01.01	A-1 Sedan,Jeep,Station Wagon(Pribadi)	32.022.984.500	28.993.800.075	2.643.448.650	31.637.248.725	98.80 %	-385.736.775	-1.20 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.01.02	A-2 Sedan,Jeep,Station Wagon(Umum)	100.000.000	86.597.850	19.783.050	106.380.900	106.38 %	6.380.900	6.38 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	163.440.000	169.422.500	34.224.200	203.646.700	124.60 %	40.206.700	24.60 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	79.000.000	78.777.500	5.953.700	84.731.200	107.25 %	5.731.200	7.25 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.01.05	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	10.024.225.000	9.702.413.725	833.879.800	10.536.293.525	105.11 %	512.068.525	5.11 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.01.06	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	3.354.089.000	3.308.160.850	251.583.275	3.559.744.125	106.13 %	205.655.125	6.13 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.01.07	D Kend. Khusus Alat-alat Berat (Pribadi)	10.000.000	9.473.000	0	9.473.000	94.73 %	-527.000	-5.27 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.01.08	D2 Kend. Khusus Alat-Alat Berat (Umum)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.01.09	E Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3	54.367.418.500	52.377.659.875	4.030.619.075	56.408.278.950	103.75 %	2.040.860.450	3.75 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.01.11	A-3 Sedan,Jeep,Station Wagon (Pemerintah)	210.086.000	209.381.675	57.039.275	266.420.950	126.82 %	56.334.950	26.82 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.01.12	B-3 Bus, Micro Bus (Pemerintah)	7.151.000	16.237.025	1.101.275	17.338.300	242.46 %	10.187.300	142.46 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.01.13	C-3 Truck, Pick Up (Pemerintah)	69.918.000	102.046.225	10.459.000	112.505.225	160.91 %	42.587.225	60.91 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.01.14	E-3 Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3 (Pemerintah)	74.000.000	94.440.550	11.537.000	105.977.550	143.21 %	31.977.550	43.21 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.01.15	D-3 Kend. Khusus Alat-alat berat dan Besar (Pemerintah)	8.688.000	20.474.000	0	20.474.000	235.66 %	11.786.000	135.66 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.03	<i>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Pokok)</i>	<i>113.490.908.000</i>	<i>102.775.415.000</i>	<i>8.831.032.500</i>	<i>111.606.447.500</i>	<i>98.34 %</i>	<i>-1.884.460.500</i>	<i>-1.66 %</i>
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.03.01	A-1 Sedan,Jeep,Station Wagon (Pribadi)	38.469.820.000	32.021.700.000	2.771.350.000	34.793.050.000	90.44 %	-3.676.770.000	-9.56 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.03.02	A-2 Sedan,Jeep,Station Wagon (Umum)	19.000.000	9.633.000	730.000	10.363.000	54.54 %	-8.637.000	-45.46 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.03.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	137.656.000	223.091.000	88.330.000	311.421.000	226.23 %	173.765.000	126.23 %

:: PAD On-Line ::

<http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/print.php?aksi=print&modul=upad088&tabel=upad08...>

KODE REKENING	JENIS PENDAPATAN	TARGET ( PERUBAHAN )	Setoran s.d BULAN LALU	Setoran BULAN INI	Setoran s.d BULAN INI	%	SELISIH LEBIH/KURANG	%
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.03.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	53.070.000	75.449.500	1.064.000	76.513.500	144.17 %	23.443.500	44.17 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.03.05	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	8.656.000.000	6.917.602.500	580.300.000	7.497.902.500	86.62 %	-1.158.097.500	-13.38 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.03.06	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	2.289.273.000	3.397.133.000	409.795.000	3.806.928.000	166.29 %	1.517.655.000	66.29 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.03.07	D Kend. Khusus Alat-alat berat dan Besar	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.03.09	E Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3	63.260.073.000	58.906.457.500	4.714.458.500	63.620.916.000	100.57 %	360.843.000	0.57 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.03.11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pemerintah)	336.690.000	552.865.000	212.805.000	765.670.000	227.41 %	428.980.000	127.41 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.03.12	B-3 Bus, Micro Bus (Pemerintah)	0	163.500.000	0	163.500.000	0.00 %	163.500.000	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.03.13	C-3 Truck, Pick Up (Pemerintah)	78.326.000	233.500.000	12.250.000	245.750.000	313.75 %	167.424.000	213.75 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.03.14	E-3 Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3 (Pemerintah)	191.000.000	274.483.500	39.950.000	314.433.500	164.62 %	123.433.500	64.62 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.03.15	D-3 Kend. Khusus Alat-alat berat dan Besar (Pemerintah)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.05	<i>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</i>	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.05.01	Premium	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.05.02	Pertamax	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.05.03	Pertamax Plus	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.05.04	Solar	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.05.05	Gas	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.05.06	Pertamina Dex	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.05.07	Pertalite	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.05.08	Dexlite	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.06	<i>Pajak Air Permukaan</i>	240.000.000	259.665.709	24.731.918	284.397.627	118.50 %	44.397.627	18.50 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.06.01	Pajak Air Permukaan (AP) Indonesia Power	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.06.02	Pajak Air Permukaan (AP) Umum	240.000.000	259.665.709	24.731.918	284.397.627	118.50 %	44.397.627	18.50 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.07	<i>Pajak Rokok</i>	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1.07.01	Pajak Rokok Provinsi	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.2	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>71.640.000</b>	<b>66.006.000</b>	<b>5.646.000</b>	<b>71.652.000</b>	<b>100.02 %</b>	<b>12.000</b>	<b>0.02 %</b>
4.02.4.02.01.00.00.4.1.2.02	RETRIBUSI JASA USAHA	71.640.000	66.006.000	5.646.000	71.652.000	100.02 %	12.000	0.02 %

:: PAD On-Line ::

<http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/print.php?aksi=print&modul=upad088&tabel=upad08...>

KODE REKENING	JENIS PENDAPATAN	TARGET ( PERUBAHAN )	Setoran s.d BULAN LALU	Setoran BULAN INI	Setoran s.d BULAN INI	%	SELISIH LEBIH/KURANG	%
4.02.4.02.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000	100.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.2.02.01.01	Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000	100.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.2.02.31	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	67.740.000	62.106.000	5.646.000	67.752.000	100.02 %	12.000	0.02 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.2.02.31.01	Sewa Rumah Dinas	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.2.02.31.02	Sewa Gedung/AUJa	3.660.000	3.590.500	305.000	3.895.500	106.43 %	235.500	6.43 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.2.02.31.03	Sewa Kantin / Foto Copy	10.080.000	9.015.500	841.000	9.856.500	97.78 %	-223.500	-2.22 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.2.02.31.04	Sewa Lahan	54.000.000	49.500.000	4.500.000	54.000.000	100.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.2.02.32	Retribusi Tempat Pelelangan	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.2.02.32.01	Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Hutan (RTPHH)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
<b>4.02.4.02.01.00.00.4.1.4</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>	<b>3.715.223.175</b>	<b>301.224.225</b>	<b>4.016.447.400</b>	<b>0.00 %</b>	<b>4.016.447.400</b>	<b>0.00 %</b>
<i>4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07</i>	<i>Pendapatan dari Sanksi / Denda Pajak Daerah</i>	<i>0</i>	<i>3.715.223.175</i>	<i>301.224.225</i>	<i>4.016.447.400</i>	<i>0.00 %</i>	<i>4.016.447.400</i>	<i>0.00 %</i>
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.13	Pendapatan Dari Sanksi / Denda Pajak Kendaraan Bermotor	0	3.591.631.300	290.828.425	3.882.459.725	0.00 %	3.882.459.725	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.13.01	A-1 Sedan,Jeep,Station Wagon(Pribadi)	0	685.710.500	71.079.150	756.789.650	0.00 %	756.789.650	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.13.02	A-2 Sedan,Jeep,Station Wagon(Umum)	0	4.576.400	619.175	5.195.575	0.00 %	5.195.575	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.13.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	0	2.304.050	1.343.700	3.647.750	0.00 %	3.647.750	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.13.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	0	2.294.250	62.250	2.356.500	0.00 %	2.356.500	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.13.05	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	0	403.242.525	35.221.375	438.463.900	0.00 %	438.463.900	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.13.06	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	0	148.197.300	5.119.400	153.316.700	0.00 %	153.316.700	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.13.07	D Kend. Khusus Alat-alat Berat (Pribadi)	0	122.050	0	122.050	0.00 %	122.050	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.13.09	E Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3	0	2.330.649.950	175.803.400	2.506.453.350	0.00 %	2.506.453.350	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.13.11	A-3 Sedan,Jeep,Station Wagon (Pemerintah)	0	5.476.425	748.425	6.224.850	0.00 %	6.224.850	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.13.12	B-3 Bus, Micro Bus (Pemerintah)	0	175.675	66.100	241.775	0.00 %	241.775	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.13.13	C-3 Truck, Pick Up (Pemerintah)	0	3.737.125	208.725	3.945.850	0.00 %	3.945.850	0.00 %

::: PAD On-Line :::

<http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/print.php?aksi=print&modul=upad088&tabel=upad08...>

KODE REKENING	JENIS PENDAPATAN	TARGET ( PERUBAHAN )	Setoran s.d BULAN LALU	Setoran BULAN INI	Setoran s.d BULAN INI	%	SELISIH LEBIH/KURANG	%
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.13.14	E-3 Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3 (Pemerintah)	0	5.145.050	556.725	5.701.775	0.00 %	5.701.775	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.13.15	D-3 Kend. Khusus Alat-alat berat dan Besar (Pemerintah)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.14	Denda/Sanksi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0	123.547.500	10.391.325	133.938.825	0.00 %	133.938.825	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.14.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	0	49.841.700	2.965.600	52.807.300	0.00 %	52.807.300	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.14.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	0	96.950	14.600	111.550	0.00 %	111.550	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.14.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	0	164.100	25.000	189.100	0.00 %	189.100	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.14.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	0	580.625	15.700	596.325	0.00 %	596.325	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.14.05	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)	0	20.363.650	329.200	20.692.850	0.00 %	20.692.850	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.14.06	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	0	25.502.700	5.065.000	30.567.700	0.00 %	30.567.700	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.14.07	D Kend. Khusus Alat-alat Berat (Pribadi)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.14.09	E Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3	0	26.944.025	1.812.025	28.756.050	0.00 %	28.756.050	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.14.11	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pemerintah)	0	0	47.200	47.200	0.00 %	47.200	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.14.12	B-3 Bus, Micro Bus (Pemerintah)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.14.13	C-3 Truck, Pick Up (Pemerintah)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.14.14	E-3 Sepeda Motor, Scooter R2 dan R3 (Pemerintah)	0	53.750	117.000	170.750	0.00 %	170.750	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.14.15	D-3 Kend. Khusus Alat-alat berat dan Besar (Pemerintah)	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.17	DENDA PAJAK AIR PERMUKAAN	0	44.375	4.475	48.850	0.00 %	48.850	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.17a	Denda PAP Indonesia Power	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.17b	Denda PAP Umum	0	44.375	4.475	48.850	0.00 %	48.850	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.07.19	Denda/Sanksi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.08	Pendapatan dari Sanksi / Denda Retribusi	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.08.1	Pendapatan dari Sanksi / Denda Retribusi	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.08.01	Denda Retribusi Jasa Usaha	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %

::: PAD On-Line :::

<http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/print.php?aksi=print&modul=upad088&tabel=upad08...>

KODE REKENING	JENIS PENDAPATAN	TARGET ( PERUBAHAN )	Setoran s.d BULAN LALU	Setoran BULAN INI	Setoran s.d BULAN INI	%	SELISIH LEBIH/KURANG	%
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.18	Penerimaan Lain-Lain	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4.18.02	Penerimaan Lainnya	0	0	0	0	0.00 %	0	0.00 %
<b>Total ( Rekening )</b>		<b>214.293.548.000</b>	<b>201.985.194.734</b>	<b>17.062.262.943</b>	<b>219.047.457.677</b>	<b>102.22 %</b>	<b>4.753.909.677</b>	<b>2.22 %</b>



## Lampiran 7

**PEDOMAN WAWANCARA****1. Karakteristik Responden**

Judul Tugas Akhir : Kontribusi Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Tujuan : Mengetahui perhitungan Pajak Air Permukaan dan kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Lokasi : Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Waktu : / /20

Pewawancara : Nurul Istiqomah

Responden : Karyawan

**2. Pedoman Wawancara**

2.1 Menurut Ibu apakah pendapatan pajak air permukaan saat ini sudah maksimal?

*“Kalau sekarang diukur dari target untuk Kabupaten Tegal sudah maksimal sekali”*

2.2 Apakah potensi pendapatan PAP bisa dinaikkan lagi?

*“Potensi dinaikkan ada karena banyak di daerah guci villa baru atau kolam renang baru yang pasti jadi sasaran untuk kita tuju”*

### 2.3 Apa saja kendala yang dihadapi dalam penarikan PAP?

*“Kendala pasti ada. Pertama, masih ada banyak wajib pajak PAP itu belum sadar bayar pajak, jadi harus ditagih ke tempatnya dulu baru mau bayar. Kedua, belum semua tempat yang jadi sasaran PAP itu punya alat pengukur volume pemakaian air, jadi setiap bulannya dikenai flat/rata”*



Lampiran 8

Buku Bimbingan Tugas Akhir



## BUKU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

---

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI  
TAHUN AKADEMIK 2019/2020  
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA**

**Nama** : NURUL ISTIQOMAH

**NIM** : 17031159

**Semester & Kelas** : BK

**Pembimbing 1** : Hetika S.Pd, M.Si

**Pembimbing 2** : Ehea Dwi-R., SE, M.Si






**Judul Tugas Akhir** : Kontribusi Ruang Air Permukaan Terhadap Penangkapan Asli Daerah Pada Unit Penanganan Penangkapan Daerah Kab.Tegal.

[akuntansi@poltektegal.ac.id](mailto:akuntansi@poltektegal.ac.id)












# PEMBIMBING 1

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
1	12/3-2020	Acc judul Tugas Akhir	
2	26/6-2020	Disebutkan contoh data yang digunakan dalam penelitian	
3		Diberi paragraf pengantar, penomoran menggunakan angka	
4	27-2020	Dilengkapi abstrak	
5	7/7-2020	ACC Tugas Akhir.	


- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
  2. Bimbingan Minimal 12 kali Samapi Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
  3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)



# PEMBIMBING 2

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
1.	12/3-2020	Acc Judul Tugas Akhir	
2.	8/7-2020	Halaman persetujuan dirapikan untuk nama dan NIPY pembimbing 2	
3.	8/7-2020	Nama pembimbing di abstrak jangan dirubah dari M.si ke M.sc	
4.	8/7-2020	Tujuan penelitian ditambahkan masing-masing pada Unit Pengelolaan pendapatan Daerah Kabupaten Tegay	
5.	8/7-2020	Halaman 22 dan 23 jarak jangan terlalu jauh	
6.	8/7-2020	Sertakan tandatangan dan stempel untuk validasi data	
7.	8/7-2020	Acc Tugas Akhir.	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
  2. Bimbingan Minimal 12 kali Samapi Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
  3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing II
	3/11/20	Abitul	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
  2. Bimbingan Minimal 12 kali Samapi Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
  3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)